

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KENAGARIAN SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN**

**Ozi Hernanda Putra<sup>1</sup>, M. Nursi<sup>2</sup>, Darwianis<sup>3</sup>**

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia  
e-mail: nursi@bunghatta.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya saldo kosong saat pengecekan kartu keluarga sejahtera dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai, ketidaktepatan waktu penyaluran program bantuan pangan non tunai, ketidaktepatan kualitas bahan pangan yang dijual pada e-Warung dan kurangnya jumlah e-Warung sebagai agen penyalur program bantuan pangan non tunai di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.054 keluarga penerima manfaat dan sampel 91 keluarga penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada responden sering terjadi kesalahan sistem seperti saldo kosong/mulfuction saat pengecekan kartu keluarga sejahtera di e-Warung, kualitas bahan pangan yang tersedia di e-Warung kurang bagus, pembagian program bantuan pangan non tunai sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan perlu diadakan penambahan jumlah e-Warung sebagai agen penyalur program bantuan pangan non tunai di Kenagarian Simpang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman adalah termasuk kategori Baik.

**Kata-kata kunci:** Implementasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai, e-Warung

### **PENDAHULUAN**

Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya dan ciri khas, karenanya dalam melakukan pembangunan tentulah tidak berjalan di jalan yang mulus. Indonesia juga banyak menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam proses pembangunan, salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan (Suharto, 2013:19).

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur, meningkatkan taraf dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2) juga termuat bahwa: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Maka dari itu, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat diharapkan oleh semua kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia sampai saat ini, yaitu suatu kondisi ketidakmampuan individu, keluarga atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Suharto, 2017). Sementara itu, kemiskinan adalah keadaan ekonomi buruk yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai persoalan, dengan kata lain sebagai sumber masalah sosial seperti asupan gizi dan pendidikan yang rendah. Namun kondisi ini sebaliknya justru dapat berbalik menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan bahkan berdampak pada terjadinya peningkatan pengangguran (Tahir.2014).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Sementara persentasi penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Program yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yaitu

Program Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT (Nurafia, 2020:1).

Pedoman Umum BPNT (2017:54) mengemukakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Pada tahun 2020, nilai bantuan BPNT yang semula Rp. 110.000.- per KPM setiap bulannya naik menjadi Rp. 200.000.- per KPM perbulan (Kemensos RI, 2020).

Dengan Adanya program BPNT di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat miskin.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sistematis dan digunakan untuk meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya serta tanpa ada pengujian hipotesis, dengan langkah-langkah alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukan generalisasi yang didasarkan pada besaran kuantitas, namun didasarkan pada makna

(kualitas) dari fenomena yang diamati (Iskandar, 2014).

Ulfatin.2014) menjelaskan juga bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di kehidupan seperti di organisasi pemerintahan, swasta, masyarakat, kepemudaan, seni dan budaya, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai kebijakan untuk dijalankan demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka pada penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari generalisasi (Taufiqurrahman.2014). Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

Observasi, yaitu pengamatan langsung yang peneliti lakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi tentang lokasi penelitian.

Wawancara (interview), yaitu sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dengan melakukan

wawancara langsung dengan narasumber atau informan melalui tanya jawab secara lisan.

Kuesioner (angket), yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

Dokumenter, yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber data yang berupa catatan literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

Sementara populasi dari penelitian ini adalah remaja yang mengalami seks bebas dan mabuk-mabukan. Populasi adalah keseluruhan dari sampel. Menurut (Herdiansyah.2015), "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Sementara sampel adalah Sebagian dari populasi. Segala karakteristik populasi tercermin dalam sampel yang diambil, Menurut (Siyoto.2015), "sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan terbatas kemampuannya peneliti maka penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasi (simple random sampling).

Peran berarti mengambil tanggung jawab atas perilaku positif dan negatif orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, mengawasi dan membimbing anak-anaknya. Karena anak adalah misi yang diberikan Tuhan kepada orang tua, maka orang tua memiliki kewajiban

untuk merawat, memelihara, merawat, dan mengkomunikasikan misi tersebut agar anak dapat mengenal Tuhan dan menampilkan diri kepada Tuhan. Menurut (Nugroho. 2014) Peran adalah “seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik pada dasarnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan bentuk pengaturan ataupun keputusan (Anggara, 2014:33).

Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik

akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Selanjutnya Prosedur kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses aktivitas yg bersifat politis. Kegiatan politis tersebut nampak pada serangkaian kegiatan yg mencakup penyusunan rencana, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian kebijakan. Sedangkan kegiatan perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, serta evaluasi kebijakan merupakan proses kebijakan publik yang dikemukakan oleh ahli William N. Dunn (Prastowo. 2016).

Unsur tujuan berasal dari suatu kebijakan artinya hal krusial dalam kebijakan, mirip halnya dengan yang dinyatakan oleh Hogerwerf sebagaimana dikutip dalam buku (Sjafari. 2014), bahwasannya kebijakan publik artinya usaha dalam mencapai tujuan-tujuan eksklusif. Sebagaimana definisi kebijakan publik yang dinyatakan, dalam konsep tersebut terdapat kandungan unsur tujuan di dalamnya yakni untuk mendapatkan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Hogerwerf sebagaimana dikutip pada buku (Djaenal. 2021), menegaskan bahwa tujuan kebijakan publik adalah a) memelihara ketertiban umum (Negara menjadi stabilisator); b) melancarkan perkembangan masyarakat pada banyak sekali hal (Negara menjadi koordinator); c) memperuntukkan dan membagi berbagai materi (Negara menjadi pembagi alokasi).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas sudah jelas bahwa setiap tujuan berasal dari pembuatan kebijakan publik yang harus pro rakyat atau demi kepentingan publik (public interest). Sehabis adanya tujuan yang jelas dalam kebijakan diharapkan pelaksanaannya nanti juga selaras menggunakan apa yang dikehendaki sebagai akibatnya menyampaikan akibat yang dibutuhkan.

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan yakni implementasi kebijakan, setelah formulasi dan perumusan maka kebijakan yang telah ditetapkan akan dieksekusi dalam tahap implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan dan proses kegiatan dalam hal ini implementasi merupakan sisi penting dalam sebuah proses kebijakan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan suatu program dapat ditinjau menurut implementasinya.

Tujuan implementasi adalah mensukseskan suatu program seperti pengertian implementasi menurut Grindle dalam (Akib, 2016:76) menjabarkan bahwa Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran.

Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala.

Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Suharto (2014:79) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan intinya adalah menunjukkan pada perubahan proses perencanaan pada taraf abstrak yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan ialah tujuan, sedangkan aktivitas-aktivitas untuk mencapainya adalah indera pencapaian tujuan.

Kesimpulan implementasi kebijakan publik adalah sebuah kebijakan dalam proses perencanaannya yang harus menuju perubahan yang lebih transparan, tidak abstrak dan pada penerapan menjadi kebijakan ialah sebuah tujuan, sebagai indera dalam mencapai tujuan adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai kebijakan.

Masalah yang sering dihadapi oleh Keluarga Penerima Manfaat saat melakukan pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera pada agen e-Warung untuk menukarkan saldo yang masuk ke rekeningnya dengan bahan pangan adalah masalah saldo kosong/mulfuction

sebanyak 70% dari data angket yang disebarkan dan ini dikategorikan sering.

Tabel 01: Distribusi responden tentang sering terjadinya saldo kosong

NO	PERTANYAAN	INDIKATOR					SKOR	%
		STS	TS	R	S	SS		
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah sering terjadi kesalahan System seperti Saldo Kosong/ <i>multifuction</i> pada saat pengecekan KKS di e-Warung?	0	1	44	46	0	318	70%

Sumber: Hasil Analisis Angket

Hal tersebut setelah dilakukan peninjauan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Adanya data kependudukan yang tidak valid karena berbeda nama antara KTP dan data penerima BanSos yang ada pada aplikasi data serta gangguan sinyal.
- b. KPMnya tidak melakukan transaksi selama 2 bulan sehingga dana nya ditarik kembali oleh pihak pusat.
- c. Terindikasi dobel karena mempunyai 2 rekening nama yang sama dengan orang yang sama hal ini terjadi karena dia mempunyai rekening bantuan PKH dan rekening Program BPNT dengan nama yang sama sehingga terjadinya tumpang tindih data yang menyebabkan saldonya tertahan.

Maka dari itu, sampai saat ini persepsi masyarakat beragam terkait hal tersebut karena kurangnya sosialisasi dan tindak lanjut terkait hal ini dari pihak pengelola Program BPNT. Hasil wawancara disampaikan hanya diberikan penjelasan dan diminta untuk bersabar.

Sementara itu dalam pelaksanaan program BPNT di kenagarian simpang yaitu waktu penyaluran yang tidak menentu ini merupakan informasi dari masyarakat KPM

dan pihak pengelola, hal tersebut tidak sesuai dengan Buku Pedoman BPNT 2018 yang menyatakan bahwa proses penyaluran dana dari pemerintah pada tanggal 25 setiap bulannya sedangkan kenyataan di lapangan proses penyaluran bantuan untuk mendapatkan tidak menentu.

Terkait dengan hal tersebut pihak Dinas Sosial yang diwakili oleh Koordinator Program BPNT Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak benar adanya atau bukan tidak tepat waktu dalam penyaluran Program BPNT tetapi karena harus disesuaikan pada aturan yang telah diberikan pusat (kementerian sosial) dan hal tersebut tidak bisa diganggu gugat, hal ini terjadi diakhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 terkait penyaluran yang dilakukan 1 kali dalam 2 bulan bahkan ada yang 1 kali dalam 3 bulan namun pengisian saldo tetap dilakukan 1 kali sebulan di rekening KKS masyarakat KPM. Harapan kedepannya semoga aturan penyaluran Program BPNT dilakukan secara berkala dan sesuai kembali dengan Buku Pedoman penyaluran BPNT.

Selanjutnya yang harus dibedah adalah terkait tanggapan masyarakat terhadap kualitas bahan pangan yang tersedia di e-warung yang di terima oleh masyarakat itu kurang bagus presentase tersebut menunjukkan angka yakni sebanyak 67%.

Tabel 02: Distribusi responden tentang ketidaktepatan kualitas bahan pangan Program BPNT

NO	PERTANYAAN	INDIKATOR					SKOR	%
		STS	TS	R	S	SS		
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah kualitas bahan pangan yang tersedia di e-Warung bagus?	0	9	43	38	1	304	67%

Sumber: Hasil Analisis Angket

Terkait hal tersebut data yang di peroleh menyimpulkan bahwa salah satu agen e-Warung yang ada di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman yang memberikan bahan pangan dengan kualitas yang dianggap dan dibuktikan kurang.

Namun hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang diantaranya Pemerintahan Nagari, pendamping program BPNT dan juga Dinas Sosial di Kabupaten Pasaman dan hal tersebut diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang dan semua karakteristik bahan pangan yang disalurkan disesuaikan pada aturan pemerintah dan buku pedoman program BPNT.

E-Warung adalah tempat untuk melakukan pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/nontunai, sehingga mempermudah KPM dalam penerimaan bantuan program BPNT, untuk mendukung pengelolaan e-Warung maka Kementrian Sosial dan Dinas Sosial telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank- Bank Negara), seperti Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri Serta Badan Usaha Logistik (Bulog/Koperasi). Khusus Kabupaten Pasaman, Bank yang telah bekerjasama dengan

e-warung adalah Bank Mandiri. Jumlah Agen e-Warung yang tersedia di Kenagarian simpang sebanyak 2 (dua) yaitu Agen Yaslahuddin (Simpang Selatan) dan Ahmad Zukri (Simpang Utara) Kalau dilihat serta disesuaikan dengan aturan, untuk 1 (satu) e-warung itu jumlah KPMnya adalah 250 KPM sedangkan jika dicek sekarang dengan data kondisi lapangan sudah melebihi kapasitas standarnya. Tentu hal ini seharusnya sudah ditambah karena sudah tidak maksimal lagi untuk penyaluran sehingga menyebabkan berbagai kendala diantaranya e-Warung kawalahan dalam mencari stok beras dan kadang lama datangnya. Tanggapan masyarakat sejauh ini juga mempersoalkan hal tersebut terlihat dari hasil kuesioner yakni sebanyak 77% yang setuju diadakan penambahan. Walaupun demikian, kedua pihak agen mengatakan masih bisa mengelola e-Warung dan mencari cara agar pelayanan terhadap proses penyaluran bisa dirasakan baik dan lancer oleh masyarakat KPM.

## KESIMPULAN

Sering terjadinya Saldo Kosong saat pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada agen e-Warung di antaranya disebabkan oleh data kependudukan yang tidak valid karena beda nama antara KTP dan data penerima BanSos yang ada pada aplikasi data serta gangguan sinyal, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak melakukan transaksi selama 2 bulan sehingga dana nya ditarik kembali oleh pihak pusat dan terindikasi double karena mempunyai 2 rekening nama yang

sama dengan orang yang sama hal ini terjadi karena dia mempunyai rekening bantuan PKH dan rekening Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan nama yang sama sehingga terjadinya tumpang tindih data yang menyebabkan saldonya tertahan.

Adanya anggapan ketidaktepatan waktu penyaluran Program BPNT di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman adalah tidak benar karena sudah dikatakan untuk jadwal penyaluran disesuaikan pada aturan yang telah diberikan pusat dan hal tersebut tidak bisa diganggu gugat, hanya saja adanya anggapan dari pihak Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat karena diakhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 penyaluran dilakukan 1 kali dalam 2 bulan bahkan ada yang 1 kali dalam 3 bulan namun untuk pengisian saldo tetap 1 kali sebulan masuk di rekening KKS masyarakat Keluarga Penerima Manfaat.

Terkait Ketidak tepatan kualitas bahan pangan yang dijual oleh salah satu agen e-Warung yang ada di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman dengan kualitas yang dianggap dan dibuktikan kurang. Namun hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang diantaranya Pemerintahan Nagari, pendamping Prgram Bantuan Pangan Non Tunai dan juga Dinas Sosial di Kabupaten Pasaman dan hal tersebut diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang dan semua karakteristik bahan pangan yang disalurkan disesuaikan pada aturan pemerintah

dan buku pedoman Prgram Bantuan Pangan Non Tunai.

Untuk kuota atau jumlah e-Warung yang ada di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman sebagai agen penyalur Program Prgram Bantuan Pangan Non Tunai masih bisa kelola oleh pihak pemilik e-Warung dan mencari cara agar pelayanan terhadap proses penyaluran bisadirasakan baik dan lancar oleh masyarakat Keluarga Penerima Manfaat.

## **SARAN**

Untuk Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pasaman sebaiknya lebih mengawasi lagi proses penyaluran yang ada di setiap Kenagarian sehingga nantinya akan tercipta suasana yang kondusif mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Untuk Pihak pemilik agen e-Warung sebaiknya lebih taat lagi dengan aturan Pusat dan Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai terkait tugas dan fungsinya.

Untuk Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai harus lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugasnya terutama pada saat penyaluran Program BPNT di e-Warung terkait dan senantiasa tetap ramah dalam menanggapi, merespon masyarakat Keluarga Penerima Manfaat jika terdapat laporan dan kendala yang mereka alami.

Untuk masyarakat KPM harus senantiasa bersyukur jika telah terdata dan mendapatkan bantuan ini, jika ada KPM yang sudah merasa kehidupan serta pendapatannya layak diminta untuk tidak ikut serta menikmati



manfaat program bantuan ini. segerakan laporan kepada Dinas terkait dan berikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Untuk Pihak Pemerintah Kenagarian sebaiknya tetap dan terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan terlaksananya program ini karena program ini sangat membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin dalam kehidupan sehari-harinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Guanwan, Imam. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo

Prastowo, Andi. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sjafari, Agus. (2014). Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta: Fisip Untirta Press.

Siyoto Andu & Sodik, M. Ali. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2013). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Ulfatin, N. (2014). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Malang: Bayumedia.

Akib, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar tidak rantasa (mtr) di kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2),

Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. Jurnal governance, 1(2).

Nurafia, a., yulianti, r., & arenawati, a. (2020). Implementasi program bantuan pangan non tunai (bpnt) di kelurahan tembong kecamatan cipocok jaya. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 4(2).

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta

Herdiansyah Haris, 2015, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Salemba Humanika

Iskandar, 2014, Metode Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kualitatif). Jakarta : Gaung Persada Press

Kementrian Sosal, 2017. Profil Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), <https://www.kemsos.go.id/page/bantuan-pangan-non-tunai> diakses 1 Desember 2021